

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) meminta agar penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) baik oleh penyelenggara dan peserta Pemilu dilakukan dengan menjunjung etika. Salah satunya dengan melakukannya secara bermartabat dan tidak melakukan politik uang.

"Kita sebaiknya melakukan semacam renungan atau imbauan agar pelaksanaan Pemilu dilakukan bermartabat dan tidak meruugikan kepentingan rakyat," kata Ketua Umum KID Ignas Kleden dalam konferensi pers bertajuk "Seruan Bersama untuk Mengawal Proses Pemilu Presiden agar Berlangsung Tertib, Aman dan Damai" di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Sabtu (5/7).

Dalam kesempatan itu juga hadir Sekjen KID Ratih Hardjano Falaakh, Bendahara KID Rustam Ibrahim dan Anggota Badan Pengurus KID Abdul Hakim Garuda.

KID merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan demokrasi dengan bergerak melalui program Sekolah Demokrasi yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Pasuruan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua.

Secara etis pemberian hadiah atau uang maupun imbalan dalam bentuk apapun dinilai KID sebagai bentuk perenggutan hak rakyat. Oleh karena itu hal-hal tersebut diminta KID untuk dihindari.

"Setiap usaha untuk merenggut kebebasan rakyat dalam menentukan pilihannya merupakan pelanggaran terhadap hak rakyat, entah dengan memberikan informasi tidak benar, entah dengan bujukan melalui uang atau hadiah, dengan paksaan terselubung atau intimidasi

terang-terangan," kata Ignas lagi.

Sumber: [Berita Satu](#)